

▶ TOL BALI

BUMN Disarankan Lepas Saham

JAKARTA—Menteri BUMN Dahlan Iskan menyarankan agar perusahaan pelat merah yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan tol Bali dan menjadi pemegang saham minoritas keluar dari proyek tersebut.

Herdijan
herdijan@bisnis.co.id

Menurutnya, BUMN pemegang saham minoritas di PT Jasamarga Bali Tol sebaiknya menjual sahamnya kepada investor agar modal awal yang telah dikeluarkan dapat diperoleh kembali.

"Saya mau mereka [BUMN dan pemegang saham minoritas] keluar dari proyek jalan tol Bali karena mereka pemegang saham minoritas bukan mayoritas," tutur Dahlan, Rabu (24/4).

Menurutnya, penjualan kepemilikan saham tersebut merupakan bisnis yang sudah umum dilakukan di perusahaan kontraktor.

"Sejumlah perusahaan pemerintah yang terlibat dalam proyek tersebut dan diminta untuk menjual sahamnya ada-

lah PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Pengembangan Pariwisata Bali, dan PT Hutama Karya.

Sementara itu, pemegang saham pengelola jalan tol Bali, yakni PT Jasamarga Bali Tol terdiri dari tujuh perusahaan, yakni PT Jasa Marga Tbk, PT Angkasa Pura I, PT Pelindo III, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Hutama Karya, dan PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero).

Sebelumnya diberitakan, komposisi saham Jasa Marga Bali Tol menjadi Pemprov Bali 8,01% dan Kabupaten Badung 8,01%, PT Jasa Marga Tbk

55% dari sebelumnya 60%, PT Pelindo III menjadi 17,98% dari sebelumnya 20%, PT Angkasa Pura I menjadi 8% dari sebelumnya 10%.

Hutama Karya menjadi 1% dari sebelumnya sebesar 2%, ADHI menjadi 1% dari sebelumnya 2%, dan BTDC tetap 1%.

Kendati demikian, keluarnya Wijaya Karya (Wika) dari proyek jalan tol Bali itu harus meminta persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto untuk mengamanatkan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).

BELUM HENGGANG

Adapun, Wika menegaskan belum hengkang dari PT Jasamarga Bali Tol, pemegang konsesi jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Tanjung Benoa.

Perseroan masih memiliki 5% saham di perusahaan konsorsium pemegang konsesi proyek sepanjang 9,7 kilometer senilai Rp 2,48 triliun tersebut.

Sekretaris Perusahaan Wika Natal

Argawan mengungkapkan secara legal, perseroan belum keluar dari jalan tol Bali karena transaksi belum terjadi, sehingga sejauh ini belum terjadi perubahan apapun dalam kepemilikan saham di Jasamarga Bali Tol.

"Kami sudah mengirim surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan beliau tidak menginginkan Wika keluar dari jalan tol Bali," ujarnya, Senin (15/4).

Pada bulan lalu, manajemen Jasamarga Bali Tol menyebut Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung menjadi pemilik saham baru di perusahaan konsorsium.

Kedua pemda memperoleh saham masing-masing 8,01% menyusul hengkangnya Wika. Selain itu, komposisi kepemilikan saham pun berubah.

Saat itu, Direktur Utama Jasamarga Bali Tol Akhmad Tito Karim mengungkapkan rencana Wika melepas sahamnya sudah muncul sejak badan usaha itu dibentuk. Namun rencana itu baru dapat terealisasi pada tahun ini.

"Keluarnya Wika justru mendatangkan dua investor lain yang masuk, yakni Pemprov Bali [8,01%] dan Kabupaten Badung [8,01%]. Hal itu sesuai dengan rapat umum pemegang saham pada 23 Januari lalu," paparnya, Senin (4/2). (zulfizal) ■

▶ Penjualan merupakan hal biasa dalam bisnis.

▶ Terdapat tujuh BUMN di Jasamarga Bali Tol.

Pemilik Baru Saham PT Jasamarga Bali Tol

Perusahaan	Saham Baru	Sebelumnya
PT Jasa Marga Tbk	55	60
PT Pelindo III	17,98	20
PT Angkasa Pura I	8	10
PT Wijaya Karya*	--	5
PT Hutama Karya	1	2
PT Adhi Karya Tbk	1	2
PT Pengembangan Pariwisata Bali tetap	1	1
Pemprov Bali	8,01	--
Pemkab Badung	8,01	--

Sumber: Jasamarga Bali Tol
Ket: *J Dalam proses pelepasan